

**HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DENGAN KINERJA
ANGGOTA SATPOL PP DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROPINSI RIAU**

YANI FEBRIYANTI DAN ZAILI RUSLI

ABSTRACT

The research was motivated by the importance of the duties and functions of municipal police in Riau Province in carrying out their duties to secure local regulations issued Riau provincial government, what law will be effective based on the author's observation duty municipal police functions Riau not fit properly, to improve performance Riau Province municipal police education and training need to be held.

The purpose of this study to see how the implementation of the municipal police training members of Riau and how well the relationship between performance and executive training to municipal police performance Riau Province. In this study the authors refer to the theoretical concepts proposed by Thoha (2005: 65) about the concept of training and performance presented by Sedarmayanti (2003: 152) while that which is the object of the study are members of Satpol PP whose job in the field, namely the control and operational techniques taken 50 people based on census results that the implementation of training members of municipal police in Riau Province large partly done quite well and having assessed the performance is also quite well with the results of the category while the relationship between members of municipal police training variable Riau province with its performance after tested with statistics. Hubungan product moment formula apparently significant relationship means nothing is good enough.

With the results of the study concluded that the implementation of training members of municipal police in Riau Province pretty good and pretty good performance after implementing training and relationship between the two variables proved to be quite good.

Keyword: Diklat Satpol PP, Kinerja Satpol PP, Performance

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, negara dan bernegara diperlukan suatu pedoman antara lain aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, berbagai dan bernegara. Tujuannya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk menegakkan aturan-aturan tersebut ada penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan sebagainya.

Peraturan Daerah pada dasarnya memuat hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang dan ada kewajiban masyarakat didalamnya baik individu maupun kelompok atau badan hukum, untuk menjaga peraturan daerah tersebut berjalan dengan efektif dan menindak setiap pelanggaran dalam Perda tersebut diperlukan suatu badan pengamanan yang dikenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya telah diatur dalam peraturan pemerintah RI No. 6 tahun 2010 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (PP) melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, 2) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, 3) Melaksanakan kebijakan perlindungan kepada masyarakat, 4) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, 5) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Keberadaan Satpol PP sangat diperlukan dalam mengamankan perda-perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2000 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perda-perda yang telah dikeluarkan.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Satpol PP harus memahami tugasnya dan memahami dalam menegakkan aturan-aturan perda seperti yang disebutkan diatas. Selain dibekali pengetahuan juga perlu keterampilan phisik, karena dalam melakukan ketertiban masyarakat Satpol PP terlibat langsung

menghadapi masyarakat baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam pencegahan serta penindakan (Eksekusi).

Selain dari itu fungsi dan tugasnya lebih berat kepada penindakan (represif) dari pada pengayoman dan pembinaan serta perlindungan kepada masyarakat serta tingkat disiplin yang masih rendah dalam melaksanakan tugas, terlihat dalam absensi apel pagi sering terlambat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja (hasil kerja) Satpol PP Propinsi Riau serta mengulangi kesalahan kerja (salah prosedur) perlu dilakukan pendidikan dan latihan. Menurut Malayu (2006:20) pendidikan dan latihan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan teoritis moral pegawai, juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Berdasarkan masalah tersebut diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul: " Hubungan Pendidikan dan Latihan Dengan Kinerja Anggota Satpol PP di Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau Pekanbaru".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan pendidikan dan latihan dengan kinerja pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau Pekanbaru
2. Bagaimana kinerja Satpol PP Propinsi Riau Pekanbaru
3. Bagaimana hasil pendidikan dan latihan oleh Satpol PP Propinsi Riau tersebut dan bagaimana pelaksanaan pendidikan dan latihan yang pernah diikuti selama ini

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan latihan serta hasilnya pada anggota Satpol PP Propinsi Riau Pekanbaru
- b. Mengetahui kinerja Satpol PP Propinsi Riau Pekanbaru
- c. Mengetahui hubungan diklat dengan kinerja Satpol PP Propinsi Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk proses pembelajaran dalam bidang penelitian serta melatih menulis dengan menerapkan teori-teori yang pernah didapatkan selama kuliah
- b. Menambah dan mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khusus dalam mengkaji pendidikan dan latihan dari Ilmu Administrasi Kepegawaian
- c. Dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian dalam bidang yang sama.

D. Konsep Teoritis

1. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Materi yang disajikan pada pendidikan latihan teknis terhadap anggota Satpol PP Propinsi Riau terdiri dari unsur teknis dan teoritis kesesuaian materi yang disajikan dipahami dan dimengerti oleh peserta diklat, materi yang diberikan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP dan materi yang diberikan kemudian diaplikasikan.

Adapun materi diklat yang bersifat teoritis antara lain adalah Pancasila, Kewarganegaraan, Protap Anti Huru-Hara, Protap Kamtibmas, Protap Bantuan Pengawasan Pejabat Pemda, yang bersifat praktis, antara lain adalah Ilmu Bela Diri, Outbond, Penggunaan Sajam, dan Non Senpi Kemampuan dan Ketahanan Jasmani, Lari, Berenang dan sebagainya.

Menurut konsep atau definisi Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pembangunan, penguasaan teori dan keterampilan untuk memutuskan terhadap suatu persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan, sedangkan latihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktifitas pekerjaan. Latihan dapat membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuannya (Rana Pandoyo dan Husnan, 1992 : 17).

Menurut pendapat Ibnu (1999 : 86). Pendidikan dan latihan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para karyawannya.

Moekijat (2000 : 13) menyatakan tujuan dari pendidikan dan latihan adalah :

- a. Menambah pengetahuan
- b. Menambah keterampilan
- c. Merubah sikap

Selanjutnya agar pelaksanaan pendidikan dan latihan sukses dengan baik, maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Materi pendidikan dan latihan
- b. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan
- c. Metode pendidikan dan latihan
- d. Sarana dan fasilitas pendidikan dan latihan harus tersedia (Moekijat, 2000 : 70)

Kemudian Thoha (2005 : 69), menyatakan bahwa pendidikan dan latihan jabatan pegawai negeri sipil adalah merupakan salah satu upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sehingga pengaturan pendidikan serta pengaturan penyelenggaraan latihan jabatan bagi pegawai negeri sipil adalah agar terjamin adanya keserasian pembinaan pegawai negeri sipil.

Selanjutnya Siagian (1999 : 83) mengatakan ada tujuh manfaat yang dapat diambil melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, yaitu :

- a. Meningkatkan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan
- b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan
- c. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang bertanggungjawab
- d. Meningkatkan semangat kerja
- e. Mendorong sikap keterbukaan
- f. Memperlancar jalannya komunikasi
- g. Penyelesaian konflik secara fungsional

Menurut Kansil (1993 : 85) tujuan khusus dari latihan adalah :

- a. Mengusahakan sikap dan kepribadian pegawai negeri sipil sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan sekarang maupun yang akan dijabatnya
- b. Meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengembangan karir pegawai negeri

- c. Membina kesatuan berpikir dan kesatuan bahasan dikalangan pegawai negeri sipil yang penting untuk kesatuan gerak yang meliputi pembinaan kerjasama

Peraturan tentang pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 31 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 ditekankan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan jabatan pegawai negeri sipil.

Program-program pengembangan eksekutif yaitu dengan mengirimkan para karyawan untuk mengikuti pendidikan dan latihan oleh orang lain/ lembaga pendidikan yang menyelenggarakan secara khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Ravianto (1999 : 92), faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan dan latihan adanya penyampaian materi latihan, metode pemberi latihan, sifat latihan yang akan diselenggarakan juga perlu diperhatikan hal-hal serbagai berikut :

- a. *Library research* atau *literature* (studi kepustakaan)
- b. *Job rotation* (tugas berpikir)
- c. *Discussion* (diskusi)
- d. *Coaching* (pelatihan)
- e. *Group dynamics* (dinamik kelompok)
- f. *Role playing* (permainan)
- g. *Multiple technic* (latihan campuran)

Dari pendapat diatas, jelaslah bahwa pendidikan dan latihan adalah merupakan saran peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga kerja atau pegawai dalam suatu organisasi atau kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai.

2. Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2003 : 152), kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seseorang, dan merupakan suatu proses manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukan secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan), ada beberapa kata kunci dari efisiensi kinerja tersebut, yaitu :

- a. Hasil kerja pekerja
- b. Proses suatu organisasi
- c. Terbukti secara konkrit
- d. Dapat diukur
- e. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

Selanjutnya menurut Ruky (2003 : 35) ada beberapa faktor untuk mengukur kinerja pegawai, yaitu :

- a. Kemampuan pegawai
- b. Disiplin pegawai
- c. Inisiatif kerja

Beberapa pedoman untuk mendefinisikan ukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Ukuran harus berhubungan dengan hasil dan perilaku yang dapat diamati
- b. Hasil harus dalam jangkauan pengawasan tim atau individu, berdasarkan target yang disepakati
- c. Data harus tersedia untuk pengukuran

Menurut Saduwasistiono (2002 : 45) bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi, indikator kinerja adalah besaran atau variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan yaitu *output*, efisiensi dan efektifitas.

Selanjutnya menurut Saduwasistiono (2002 : 48) bahwa indikator kinerja lainnya adalah :

- a. Produktifitas yaitu merupakan konsep efisiensi atau rasio (*output* dan *input*)
- b. Kualitas pelayanan
- c. Responsifitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan

Menurut Ruky (2003 : 45) pengukuran kinerja ini berguna untuk:

- a. Mendorong pegawai berlaku positif atau memperbaiki pekerjaan yang mereka lakukan

- b. Sebagai bahan penelitian bagi pihak manajemen, apakah mereka telah bekerja dengan baik
- c. Memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan organisasi

Klasifikasi ukuran lain yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja yang bersifat pelayanan, antara lain sebagai berikut :

- a. Produktifitas indikator yaitu indikator yang memfokuskan pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- b. *Utilization rates*, yaitu indikator yang menunjukkan jumlah jasa yang tersedia yang dipergunakan seperti pada tingkat penempatan sekolah
- c. *Time targets*, yaitu indikator yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan, misalnya jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan
- d. *Volume of service*, misalnya jumlah perbaikan rumah yang diselesaikan

E. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Anggota Satpol PP Propinsi Riau yang sudah mengikuti diklat pada tahun 2010 yaitu anggota yang tergabung Bidang Pengendalian dan Operasional berjumlah 50 orang.

2. Sampel

Pengambilan responden untuk tingkat pimpinan sebagai key informan dan penulis mengambil semuanya dari anggota Satpol PP yang sudah mengikuti diklat dan karena tugasnya banya dilapangan dalam penertiban Perda maka diambil responden pada bagian/bidang pengendalian dan operasional diambil secara teknik sensus

3. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, kemudian data tersebut dianalisa sesuai dengan jenis dan macam data yang diperlukan, selanjutnya digambarkan secara deskriptif dan hasuk hubungan dua variable, variabel x (diklat) dan variabel y (kinerja Satpol PP) dianalisa dengan menggunakan rumus korelasi product moment, rumus korelasi sebagai berikut:

$$r_{yx} = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}}.$$

Keterangan:

r_{yx} : adalah hasil tingkat hubungan antara variabel x (diklat) dengan variabel y (kinerja) Satpol PP Propinsi Riau

x : adalah variabel diklat dari hasil jawaban seluruh responden

y : adalah variabel kinerja dari hasil jawaban seluruh responden

x^2 : jumlah kuadrat variabel diklat dari hasil jawaban responden

y^2 : jumlah kuadrat variabel kinerja dari hasil jawaban responden

Untuk melihat hubungan variabel pendidikan dan latihan terhadap kinerja anggota satpol PP Propinsi Riau penyusun memakai analisis korelasi *product moment* dengan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Rumus Korelasi Product Moment

$$R_{yx} = \frac{\Sigma XY}{\sqrt{(\Sigma X^2)(\Sigma Y^2)}}$$

$$\text{Rata-rata } \bar{X} = \frac{523}{50} = 10,5$$

$$\text{Rata-rata } \bar{Y} = \frac{365}{50} = 7,9$$

Rumus Korelasi

$$YX = \frac{\Sigma 17,8}{(26,5 \times 42,5)} = \frac{\Sigma 17,8}{33,55}$$

$YX = 50,1 =$ Cukup berhubungan antara variabel diklat

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ; Bahwa berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan diklat anggota Satpol PP Propinsi Riau pada umumnya peserta anggota Satpol PP Propinsi Riau berjalan dengan cukup baik, begitu

menurut rekapitulasi data kinerja anggota Satpol PP Propinsi Riau menunjukkan hasil yang cukup baik pula. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara diklat dengan kinerja anggota Satpol PP Propinsi Riau.

2. Saran

- a. Dalam pelaksanaan diklat dalam kategori cukup baik, berarti ada kelemahannya sarana dan fasilitas diklat yang kurang memadai seperti yang dilakukan di asrama Yon Infantri Salo yang sarana dan fasilitasnya sudah usang, oleh karena itu perlu diperbaiki sarana tersebut, untuk bagi anggota yang akan mengikuti diklat.
- b. masih terdapat kelemahan yaitu sering pelaksanaan diklat lebih cepat selesai dari waktu yang ditetapkan. Oleh karena pelaksanaan diklat anggota Satpol PP harus sejalan dengan jadwal yang tetap ditetapkan.
- c. Masih terdapat anggota Satpol PP kurang disiplin meninggalkan tugas oleh karena itu disarankan agar ditingkatkan pengawasan dan pemberian izin keluar serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin.
- d. Untuk meningkatkan kinerja anggota Satpol PP yang lebih baik lagi perlu ditingkat kesejahteraannya dengan pemberian seperti pakaian dinas, pakaian olahraga, minuman dan makanan kecil dan sebagainya.